

## PENDIDIKAN DASAR ANTI KORUPSI DALAM TINJAUAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

**Imadah Thoyyibah**  
**STISIP Persada Bunda Pekanbaru**  
**Email: imadahthoyyibah80@gmail.com**

### ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan moral yang tidak mengenal batas usia, profesi, status sosial, agama, ataupun tingkat pendidikan seseorang. Fakta bahwa korupsi juga terjadi di dunia pendidikan mengindikasikan adanya kegagalan atau kesalahan terhadap pola pengasuhan, pendidikan dan pembelajaran. Tulisan ini menyajikan konsep dasar pendidikan anti korupsi secara deskriptif analitis sebagai upaya membangun landasan moral dan karakter dasar anti korupsi pada dunia pendidikan. Konsep tersebut dibingkai dalam konsep pendidikan Islam secara filosofis yang menyangkut hakikat, karakteristik, dan tujuan dari pendidikan yang Islami.

Pendidikan Dasar Anti Korupsi dalam perspektif Filsafat Pendidikan Islam bermuara pada pendidikan *Iman, Islam, dan Ikhsan*. Pendidikan ini harus memperhatikan kelemahan dasar manusia yang menyebabkannya berlaku jahat yaitu 'kepicikan' (*dha'af*) dan 'kesempitan pikiran' (*qathr*); karena kepicikan itulah manusia suka terburu-buru nafsu, panik, dan tidak mengetahui akibat jangka panjang dari reaksi-reaksi yang dilakukannya. Oleh karena terburu nafsu inilah manusia menjadi sombong atau putus asa sehingga terjebak dalam dua kutub ekstrim yang menjadikannya selalu goyah. Dua kutub ekstrim tersebut adalah kesombongan dan keputusasaan. Energi moral yang dapat menyeimbangkan dua kutub ekstrim tersebut adalah *Taqwa*; yang berarti melindungi diri dari akibat-akibat perbuatan sendiri yang buruk dan jahat seperti korupsi. Sikap anti korupsi dapat terbentuk setelah melalui proses penanaman nilai-nilai moral (*Tarbiyah*), pengenalan (*Ta'lim*) tentang alam, sejarah, dan diri sendiri dengan tujuan menghindarkan dari kesempitan berfikir, serta pembentukan karakter (*Ta'dib*) yang berdasarkan prinsip *Iman, Islam, dan Ikhsan* yang dimulai sejak usia dini sampai usia dewasa (*baligh*).

*Keyword: Anti Korupsi, Pendidikan Dasar, Filsafat Pendidikan Islam*

### ABSTRACT

Corruption, is morally crime which do not recognize boundaries of age, profession, social status, religion, or level of education. The fact that corruption has also penetrated the world of education shows that the values of honesty, kindness, justice, has faded amid corruption mental hegemony. This phenomenon indicates a failure or an error on the pattern of education, teaching, and our learning. This paper presents the basic concepts of against-corruption education descriptive as an effort to build the basic moral and character of against-corruption education. The concept is framed in the concept of Islamic philosophical education is about the nature, characteristics, and objectives of Islamic education.

Basic Education of Against-Corruption in Islamic philosophy perspective boils down to education of the Faith, Islam, and Ikhsan. This education should pay attention to the basic human weakness that caused an evil force that is 'narrow-mindedness' (*dha'af*) and 'narrow-mindedness' (*qathr*); because of the pettiness that a man like impetuous, panic, and do not know the long-term result of the reactions were performed; because this impetuous human being overbearing or desperate. Humans have been trapped in the two extremes that make always shaky. The two extremes are the pride and despair. Therefore, moral energy is needed to balance the two extremes, namely *Taqwa*; which means to protect humans from the consequences of their own bad deeds and evil like corruption will, Against-corruption attitude can be formed after going through the process of planting moral values (*Tarbiyah*),

introduction (*Ta'lim*) about nature, history, and self with the aim of avoiding the narrowness of thinking, and the formation of character (*Ta'dib*) based on the principle of *Iman*, *Islam*, and *Ihsan* starting from an early age to adulthood (*baligh*).

*Keyword: Against Corruption, Basic Education, Philosophy of Islamic Education..*

## PENDAHULUAN

Di era zaman globalisasi ini, istilah korupsi sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Bahkan istilah ini sering kali disebut-sebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dalam pemberitaan di media sosial nasional maupun internasional. Pelakunya tidak mengenal batas usia, jabatan, ataupun profesi masyarakat. Di berbagai belahan dunia, praktik korupsi juga telah menjadi persoalan moral yang terus ditanggulangi dan “diperangi” secara konvensional. Pada akhir tahun 1970-an, dunia mulai menyoroti korupsi sebagai tindak kriminal. *The Crown Council*, suatu lembaga di Inggris memperkenalkan *Commercial Crime*, yaitu bentuk kejahatan-kejahatan serius yang implikasinya berhubungan dengan ekonomi, keuangan, dan perdagangan (Parwadi, 2010: 14-15).

Sejak terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Reformasi, berita korupsi atau penangkapan seorang koruptor di Indonesia nyaris selalu menghiasi media televisi, radio, koran, majalah, dan media sosial lainnya. Oleh sebab itu, memahami makna korupsi tidaklah sulit bagi masyarakat. Seorang anak usia Sekolah Dasar (SD) pun sudah mampu mencerna dan mengidentifikasi perilaku korupsi dari kawannya yang dianggap tidak jujur atau curang dalam mengemban amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Penulis mendapatkan fakta ini dari keluhan anak-anak didik yang tidak setuju dan tidak percaya terhadap salah satu kawan mereka yang telah ditugaskan sebagai bendahara kelas, dengan alasan yang bersangkutan pernah melakukan ‘korupsi’ terhadap uang mereka. Saat itu penulis menyimpulkan bahwa anak-anak cukup memahami dengan makna korupsi. Korupsi menjadi sesuatu yang dianggap tidak baik, jahat dan penuh cela. Seorang yang ‘korup’ seakan suatu predikat yang bisa merusak citra dan kehormatan seseorang di masyarakat sehingga tidak mampu untuk dipercaya kembali.

SEMAI (Sembilan Nilai) anti korupsi pernah dikenalkan oleh KPK sebagai bentuk gerakan anti korupsi. Nilai-nilai tersebut sebagai landasan moral terhadap perilaku anti korupsi pada masyarakat. Nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam sebuah kalimat “JUPE TANGKER MANDI SEBEDIL” yang meliputi nilai; jujur, peduli, tanggungjawab, kerja keras, mandiri, sederhana, berani, dan adil (Mubayyinah, 2017: 228). Sejauh ini nilai-nilai tersebut masih dianggap relevan untuk pendidikan dan pengembangan karakter anti korupsi di masyarakat terutama pada anak usia dini.

Akan tetapi, persoalan korupsi tidak berhenti pada sosialisasi gerakan anti korupsi saja. Sejauh ini kejahatan korupsi yang ditanggulangi oleh pemerintah hanya berkutat pada korupsi di jalur birokrasi saja. Sementara praktik-praktik korupsi di kalangan masyarakat bawah masih terus mengakar bahkan membudaya tanpa tersentuh oleh hukum. Sebut saja tradisi suap-menyuap, memberi hadiah, uang pelicin, menjadi hal yang lumrah untuk mendapatkan kemudahan dan memuluskan kepentingan. Terutama hal ini terjadi juga dalam dunia pendidikan. Untuk mendapatkan nilai bagus dan indeks prestasi yang memuaskan, seorang murid, mahasiswa, bahkan wali murid sekalipun rela meyuap seorang pendidik dengan sejumlah uang atau hadiah. Disini harga diri dan kehormatan seorang guru sebagai pendidik dipertaruhkan. Tetapi faktanya praktik ini masih subur terjadi dengan aksi tutup mulut, tahu sama tahu oleh kedua belah pihak. Ada yang terang-terangan, ada pula yang dibawah tangan.

Perlu kiranya menyelidiki asal muasal dari mental korup yang terjadi di masyarakat sekitar kita, dari pejabat tinggi sampai kalangan masyarakat kelas bawah, khususnya di lingkungan orang-orang berpendidikan. Apa yang menjadi pola pikir mereka sehingga korupsi sangat sulit dihilangkan dari budaya sosial kita. Nilai-nilai kejujuran, kebaikan, keadilan,

menjadi luntur di tengah hegemoni mental korupsi. Adakah yang salah dengan pola pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran kita sehingga korupsi juga mampu menembus dunia pendidikan?. Apakah korupsi ada menjadi indikasi gagalnya dunia pendidikan. Apa hakikat dari pendidikan dan bagaimana memberikan pendidikan dasar anti korupsi kepada masyarakat?

Tulisan ini bermaksud mencari konsep dasar pendidikan anti korupsi yang tepat sebagai upaya membangun karakter dasar anti korupsi pada dunia pendidikan khususnya untuk masyarakat yang masih awam dengan praktik korupsi. Konsep tersebut dibingkai dalam konsep pendidikan Islam secara filosofis yang menyangkut hakikat, karakteristik, dan tujuan dari pendidikan yang Islami, yang diharapkan dapat menjadi konsep dasar dalam praktik pendidikan dasar anti korupsi bagi masyarakat Indonesia.

### TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema pendidikan dasar anti korupsi dapat ditemukan di beberapa jurnal publikasi. Salah satunya oleh Rasyidi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam*". Ia menyimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam berimplikasi pada tiga hal: 1) sistem atau konsep kurikulum dimana seluruh bidang mata pelajaran harus dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi; 2) pembiasaan dan keetaladanan dalam pembelajaran, serta 3) kapasitas guru untuk dapat menjadi teladan dan informan akan bahaya korupsi.

Penelitian kuantitatif berdasarkan observasi langsung juga dilakukan oleh Lestari (2016) yang berjudul "*Peningkatan Perilaku Anti Korupsi melalui Metode Story Telling*". Ia menggabungkan multidisiplin ilmu untuk mendukung penelitiannya yaitu Psikologi dan Sosiologi; Pedagogik dan Kognitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *Story Telling* (dongeng) sangat efektif dilakukan dalam pembelajaran antikorupsi. Melalui 3 siklus eksperimennya menunjukkan adanya peningkatan perilaku anti korupsi pada siswa TK rata-rata 70-80 %. Keberhasilan ini didukung oleh kepiawaian seorang guru dalam memberikan metode dongeng secara menarik serta alat-alat permainan yang mendukung pembelajaran. Namun hasil penelitian ini hanya bisa diukur selama peserta didik berada di lingkungan sekolah, adapun perilaku di luar sekolah adalah tanggung jawab orang tua untuk memonitor keberlanjutan dari efektifitas metode *story telling*.

Penelitian lain oleh Rosidah A. Hidayat (2013) berjudul "*Penanaman Karakter Inti Anti Korupsi Dalam Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini*" menyimpulkan bahwa karakter inti anti korupsi pada peserta didik seperti nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan bukan hanya disebabkan oleh model pembelajaran yang baik tetapi juga ditentukan oleh seorang pendidik yang memahami cara dan gaya peserta didik dalam belajar. Pendidik dituntut untuk memperkaya metode pembelajaran dalam strategi penanaman karakter inti anti korupsi.

SEMAI (Sembilan Nilai) yang diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga masih dianggap relevan untuk penerapan pendidikan anak usia dini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mubayyinah (2017) dalam jurnal yang berjudul "*SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini*". Dalam penelitian tersebut lebih banyak mendeskripsikan sembilan nilai dasar anti korupsi secara konseptual. Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif, rasional. Ia menegaskan pentingnya pencegahan perilaku korupsi dimulai dari usia dini oleh para orang tua sebagai pendidik utama selanjutnya pemberantasan korupsi adalah wilayah masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga-lembaga sosial maupun pemerintah.

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian-penelitian diatas maka penelitian penulis ini sedikit banyak memberikan warna baru dalam pengembangan konsep pendidikan anti korupsi untuk masyarakat secara umum dan untuk anak-anak usia dini (dasar) secara khusus. Penelitian ini dibingkai dalam analisis filosofis perspektif pendidikan Islam.

Tujuannya adalah dapat memberikan kerangka konseptual prinsip-prinsip pengembangan pendidikan di Indonesia yang berbasis pendidikan karakter, terutama pembangunan karakter anti korupsi pada anak-anak generasi bangsa. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pendidik; orang tua dan guru di berbagai bidang di masyarakat bahwa pentingnya menanamkan nilai-nilai moral yang berbasis filosofi ajaran agama.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif tentang pendidikan dasar anti korupsi dengan pendekatan analisis filsafat pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan (*library research*) baik dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal penelitian. Model generalisasi secara empirik mengambil sumber dari pustaka dan penelitian terdahulu. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode induksi-deduksi, deskripsi, dan interpretasi.

Metode induksi-deduksi merupakan generalisasi dari premis-premis yang khusus ke umum, dan yang umum ke khusus dengan cara mengambil teori-teori ilmiah yang diambil dari hasil riset pustaka yang berkaitan dengan tema kajian ataupun beberapa fakta sosial yang berkaitan sebagai *sample* dan sumber analisis dari penelitian ini.

Metode deskripsi diawali dengan pengertian seputar korupsi, konsep pendidikan dasar anti korupsi, dan konsep pendidikan Islam. Secara eksplisit, seluruh hasil data dan fakta akan dideskripsikan dan dibahasakan dalam logika filsafat Islam untuk dapat dipahami dan diambil intisari dari kajian.

Beberapa fakta dan rumusan masalah yang sudah dideskripsikan, secara interpretatif dianalisis berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Secara rasional, data-data empiris dibaca dengan pemahaman interpretatif, untuk menemukan filsafat tersembunyi (Muhadjir, 1996: 56/74).

## KERANGKA TEORI

### Pengertian Korupsi

Istilah korupsi pada awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptive*, *corruptus*, *corruptio*= menyuap, penyuapan. Kata ini berasal dari kata *corrumpere*= merusak (suatu kata Latin tua). Dari bahasa Latin inilah diadaptasi ke bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*, dalam Perancis: *corruption*, dalam Belanda *corruptive* atau *korruptie* (Nurdjana, 2010:14).

Kamus Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1984:524) menyebutkan, 'korup' berarti: busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dsb). 'korupsi'=perbuatan yang buruk (spt. Penggelapan uang, penerimaan uang, sogok dsb). Korupsi dalam *Kamus Ilmiah Populer* (Partanto: 1994: 375), berarti kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan.

Secara historis konsep korupsi merujuk pada tingkah laku politik atau seksual. Kata Latin *corruptus* menggambarkan perbuatan apa saja yang jahat dan merusak keutuhan. Ada nada moral pada kata tersebut. kamus *Oxford* disebutkan, *corrupt*=(of person, their action) *immoral; depraved, dishonest (esp. through taking bribes)*.

Pengertian korupsi yang secara moral dan praktis mengandung unsur-unsur dari korupsi adalah sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Nurdjana berikut ini:

"Korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara/ bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/ keluarga/ golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, serasi dan selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu dunia yang berlebihan sehingga merugikan keuangan/

kekayaan negara dan atau kepentingan masyarakat/ negara baik secara langsung maupun tidak langsung” (Nurdjana, 2010: 19-20).

Beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang ‘melawan hukum, tidak wajar, dan tidak bermoral’. Substansi korupsi sebagai suatu kejahatan moral secara etis dipandang tidak baik dari sudut manapun. Secara deontologist, korupsi bersifat ‘jahat’ dan ‘merusak’ system atau tatanan masyarakat. Secara teleologis, korupsi tidak banyak memberi manfaat bagi orang banyak dibanding kerugian yang ditimbulkannya. Korupsi sebagai suatu kejahatan moral secara praktis dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat (ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial). Perbuatan korupsi seperti suap-menyuap (*bribery*), penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, pemerasan (*extortion*), penggelapan atau kecurangan (*fraud*), dan lain-lain diantara tujuannya adalah untuk mmeperkaya diri sendiri dan atau kelompok, yang berakibat merusak tatanan sosial dan merugikan serta merampas hak orang banyak.

### **Korupsi Dalam Terminologi Islam**

Apabila korupsi dipahami sebagai perbuatan yang busuk dan merusak, maka dalam Islam korupsi termasuk perbuatan *sayyi’ah* (buruk, jahat) atau *madzmumah* (tercela) yang secara syar’i perbuatan ini dilarang dalam agama Islam. Jika definisi korupsi mengacu pada khazanah Islam maka akan sulit menemukan definisi yang sama persisi seperti istilah yang dikenal saat ini. Hal ini disebabkan karena korupsi merupakan istilah modern yang padanan katanya tidak dijumpai secara tepat dalam fiqih. Akan tetapi pengertian korupsi dapat ditelusuri dengan mengacu pada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antar manusia yang dengan mudah dapat ditemukan dalam beberapa ungkapan tindakan curang yang dilarang dalam hukum Islam.

Al-Qur’an tegas melarang memakan harta yang dihasilkan dari cara yang bathil seperti korupsi (Alatas 1981: 188).

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian di antara kamu dengan jalan bathil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188)

Beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan yang mengandung unsur-unsur tindak kriminal korupsi yang dilarang Islam adalah: *ghulul* (penggelapan), *riswah* (suap), *khiyanat* (tidak amanah/menepati janji), *mukabarah* (eksploitasi secara tidak sah), *ghasab* (mengambil paksa dengan kekerasan dan kekuasaan), *sariqah* (mencuri), *intikhab* (merampas, menjambret), dan *aklu suht* (makan hasil atau barang haram). Tetapi hanya dua bentuk saja yang lebih mendekati makna korupsi menurut terminologi Islam sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (Widjoyanto, B. dkk (ed.), 2010):

### **Konsep Pendidikan Dasar Anti Korupsi**

Perilaku korupsi tidak mengenal waktu, tempat, status, jabatan, pekerjaan, bahkan usia sekalipun. Secara psikologis, perilaku korupsi adalah persoalan mental; yaitu terkikisnya nilai-nilai kejujuran dalam diri pelaku dan cenderung mengabaikan nilai-nilai normatif agama dan sosial. Secara etis, korupsi adalah persoalan moralitas; yaitu sejauh mana pelaku memahami hukum-hukum moral tentang nilai baik dan buruk, pantas atau tidak pantas. Pengetahuan etis ini membutuhkan kecerdasan nalar dan dasar pengetahuan yang normatif, baik itu dari norma budaya, agama, dan sosial. Dengan kata lain pengetahuan ini hanya didapat melalui proses penanaman nilai-nilai dan pembentukan perilaku yaitu pendidikan.

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan berupa awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Pendidikan secara bahasa dapat diartikan sebagai perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia melalui pelatihan dan pengajaran.

Pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional) menuju

kearah tabiat atau perilaku manusia yang berkemanusiaan. Selain itu pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, ataupun latihan bagi perannya dimasa mendatang (UU No.2/1989/tentang Pendidikan Nasional, bab 1, pasal 1, ayat (1)).

Pengertian pendidikan menurut UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, ketrampilan, dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, serta akhlak, mulia.

Pendidikan pertama kali didapat oleh anak bukanlah dari bangku sekolah formal melainkan dari kelompok terkecil dari masyarakat yaitu keluarga. Oleh sebab itu pentingnya memahami pendidikan dasar anti korupsi berbasis keluarga. Berbagai pendekatan penting dilakukan. Salah satunya adalah dengan membumikan gerakan anti korupsi yang dilakukan sejak anak usia dini. Essensi terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah pencegahan. Pencegahan mesti dilakukan sejak dini dan mulai dari hal-hal yang sederhana. Anak menjadi objek sekaligus subjek penting dalam upaya tersebut. Pendidikan antikorupsi bagi anak usia dini penting dioptimalkan, baik melalui ranah formal, maupun nonformal.

Manusia pertama kali dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan harus menggantungkan diri pada orang lain, terutama ibunya. Karena manusia pertama-tama sekali tergantung pada orang lain, maka penting sekali peranan orang tua (biasanya ibu) terhadap perkembangan kepribadian anak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian orang tua kebanyakan menjadi pemurung tidak bersemangat dan daya tangkapnya kurang baik sehingga perkembangan kecerdasannya pun terbelakang (Sarwono, 2013: 67).

Pengaruh orang tua dan lingkungan masa kanak-kanak ini tidak berhenti di masa kanak-kanak saja. Ia berlangsung terus, kadang-kadang sampai sumur hidup, khususnya pengaruh yang berupa pengalaman-pengalaman yang menegangkan, menakutkan, mengguncangkan, membahayakan, dan lain-lain. Menurut penganut psikoanalisis, pengaruh pengalaman masa kanak-kanak kadang-kadang tidak dirasakan atau disadari oleh orang yang bersangkutan, karena semua itu disimpan di alam bawah sadarnya, tetapi dapat timbul dalam bentuk perilaku-perilaku yang aneh, yang lain dari perilaku normal, dan yang tidak dimengerti oleh pelakunya sendiri.

Memberikan pendidikan anti korupsi pada anak perlu juga memperhatikan pemahaman psikologi, terutama melihat masa-masa negativistik anak. Pada masa **negativistik pertama**; sekitar usia dua atau tiga tahun, seorang anak mulai melihat kemampuan-kemampuan tertentu pada dirinya. Sikap terhadap orang tua mulai berubah. Di satu pihak dia masih membutuhkan orang tua, di lain pihak rasa ke-aku-annya mulai tumbuh dan dia ingin mengikuti kehendak-kehendaknya sendiri. Dia menjadi sering membantah. Pada masa **negativistik kedua**; timbul pada usia lima atau enam tahun, pada saat anak mulai mengenal lingkungan yang lebih luas (sekolah, anak-anak tetangga, dan lain-lain). Pendapat orang tua sekarang bukanlah satu-satunya pendapat yang harus dituruti karena ia mulai mendengar pendapat-pendapat orang lain (guru, kawan, tetangga, dsb), yang kadang-kadang berbeda atau bertentangan dengan pendapat orang tuanya. Karena itu ia mulai suka membantah dan tidak menurut kata orang tuanya. Masa negativistik kedua sering ditandai dengan *temper tantrum*, yaitu perilaku mengamuk, menangis, menjerit, merusak, menyerang, dan menyakiti diri sendiri, yang dilakukan apabila ada kehendak-kehendak yang tidak terpenuhi (Sarwono, 2013: 68).

Dalam perkembangan kepribadiannya, anak selalu membutuhkan seorang tokoh *identifikasi*, yang berarti dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain. Pada anak biasanya tokoh identifikasinya adalah ayah dan ibunya. dalam proses identifikasi ini, anak menganambil alih (biasanya dengan tidak disadari oleh anak itu sendiri) perilaku, kebiasaan, sikap, norma, dan nilai dari tokoh identifikasi. Dalam proses ini anak tidak saja ingin menjadi identik secara lahiriah saja, tetapi juga secara batin (Sarwono, 2013: 69). Oleh sebab itu, orang

tua adalah suri tauladan pertama anak dalam berperilaku. Apabila orang tua dapat mendidik anak dengan lembut dan kasih sayang, maka ikatan batin anak akan semakin kuat dan proses identifikasi menjadi lebih besar. Orang tua yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik dan berkualitas. Pembentukan moralitas anak fundamennya adalah dari pola pendidikan dan pengasuhan orang tua di masa kecil sebelum ia beranjak dewasa.

Karena anak adalah masa emas sekaligus masa beresiko maka masa depan bangsa berada pada kualitas anak sekarang. Deklarasi Dakar tahun 2000 menyerukan bahwa pendidikan anak merupakan “*Education for All*”. Upaya mendidik antikorupsi mesti dilakukan secara sistematis dan komprehensif. *Pertama*, dengan model pendidikan yang menyenangkan sebab usia anak adalah usia bermain. Berbagai perangkat dapat dioptimalkan sebagai pendekatan, seperti permainan, lagu, cerita bergambar, komik, dan lainnya. *Kedua*, dengan pendekatan yang sinergis melalui pendidikan agama dan nilai budaya. Kejujuran merupakan bagian utama dalam ajaran agama dan nilai budaya. Pendidikan ini penting menyisipkan penanaman nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi. *Ketiga*, dengan keteladanan. Contoh atau teladan sangat berharga bagi anak dibandingkan dengan banyaknya teori-teori yang didengarkannya. Kejujuran penting ditanamkan melalui orang-orang di sekitarnya.

### **Perspektif Filsafat Pendidikan Islam**

Pendidikan adalah hal yang penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, seseorang dapat hidup terhormat, terpuja, dan dapat memiliki karir dan masa depan yang cemerlang. Selain itu, status orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan akan memiliki konotasi pada kapasitas seseorang dalam hal sikap, skill, kecerdasan, dan kemampuannya dalam mengikuti norma-norma sosial.

Perspektif Filsafat Pendidikan Islam bermaksud menggali makna Pendidikan Islam secara filosofis. Berbicara filsafat berarti secara metodologis tidak bisa dipisahkan dari 3 ruang lingkup pembahasan filsafat yaitu ontologi (metafisika), epistemologi (logika dan paradigma), dan aksiologi (etika).

Filsafat, secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *Philosophia*. *Philos* yang berarti cinta atau *Philia* (persahabatan, tertarik, kepada), dan *Shopos* berarti pengetahuan, hikmah, kebijaksanaan, ketrampilan, pengalaman praktis, intelegensi (Lorens, 2000: 242). Jadi, filsafat adalah cinta terhadap ilmu pengetahuan ataupun hikmah. Berfilsafat adalah berpikir *radix* artinya akar, sehingga berpikir radikal artinya sampai ke akar suatu masalah, mendalam sampai ke akar-akarnya, bahkan melewati batas-batas fisik, dan seringkali disebut metafisis (Asy'arie, 1999: 3). Ciri-ciri pemikiran kefilsafatan selain radikal diantaranya adalah konseptual, kritis, runtut (sistematis), rasional, menyeluruh (komprehensif), dan universal (yaitu pandangan yang mengatasi alam semesta) (Kattsoff, 1992).

Dalam Islam, Filsafat dikenal dengan terminologi *Hikmah*. Al-Qur'an menjelaskan bahwa nabi Muhammad SAW, dibekali dengan kitab dan hikmah.

“Dia (Allah) yang mengutus diantara orang-orang ummi, seorang Rasul dai kalangan mereka, yang menjelaskan kepada mereka ayat-ayatNya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya adalah dalam kesesatan yang nyata” (QS. 62:2).

*Hikmah* dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan, yang mendalam, kearifan dan kebijakan, pengertian mendalam yang diperoleh dari balik fakta-fakta, kejadian, atau peristiwa. Menurut al-Razi, *hikmah* merupakan keutamaan ilmu dan amal. Disebut *hikmah* karena ia terbentuk dari hukum-hukum dan perumusan berbagai permasalahan, memperkuatnya, dan menjauhkannya dari berbagai sebab kelemahan (al-Razi, 1985: 187). Menurut Al-Syaibani (1979), filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian dan sikap terhadapnya.

Adapun filsafat pendidikan berarti suatu upaya untuk menyelidiki hakikat pendidikan secara fundamental, logis, dan sistematis. Menurut Winarno Surachmad Filsafat Pendidikan adalah fundamen atau pijakan untuk melahirkan pendidikan secara praksis. Islam adalah keselamatan, aturan, pembeda agama; agama Samawi atau agama yang Allah ridhoi. Kata

Islam secara semantik berasal dari akar kata *salima* artinya menyerah, tunduk, selamat. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah, dan dengan menyerahkan diri kepada-Nya maka ia memperoleh keselamatan dan kedamaian (Asy'arie, 1999: 4). Jadi filsafat pendidikan Islam berarti konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam.

Menurut Asy'arie, ciri-ciri filsafat atau pemikiran Islam adalah selalu menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai kiblat dalam berfikir. Metode pemikiran Islam dibangun berdasarkan sunnah Rasul dalam berfikir yang tidak lain adalah metode rasional transedental, yaitu menganalisis fakta-fakta empirik dan mengangkatnya pada kesadaran spiritual, kemudian membangun visi transeden dalam memecahkan persoalan. Sunnah itu dibakukan dalam kitab (al-Quran) dan hikmah (filsafat). Secara operasional, metode rasional transedental ini dapat dijalankan dengan menempatkan Al-Qur'an dan *aqal* (kesatuan pikiran dan *qalb*) berada dalam hubungan dialektik, untuk memahami realitas. Hubungan Al-Qur'an dan akal berada dalam hubungan dialogis yang fungsional, tidak struktural yang subordinatif. Akal tidak berada diatas wahyu dan juga sebaliknya. Dalam aktualisasinya wahyu (al-Qur'an) tidak bias berdiri sendiri, sebagai pedoman hidup bagi manusia, ia sepenuhnya justru bergantung pada kapasitas akal dalam memahaminya. Tanpa akal, wahyu justru kehilangan makna bagi kehidupan manusia (Asy'arie, 1999: 20-21).

Perspektif Filsafat Pendidikan Islam, berarti perspektif yang mengedepankan metode rasional transedental dalam menganalisis persoalan-persoalan pendidikan. Secara operasional metode ini menempatkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam berfikir demi mewujudkan konsep kebenaran dan visi pendidikan Islam. Prinsip dasarnya ialah bahwa Allah sebagai *rabb* (pendidik, pengatur, pemelihara) sejati alam semesta ini, dan manusia dengan akal budinya mampu mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya merealisasikan prinsip-prinsip Islam yang *rahmatan lilalamin* ke dalam dunia pendidikan yang Islami.

### **Konsep Pendidikan Islam**

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada term *al-tarbiyah*, *al-ta'dib*, *al-ta'lim*. Dari ketiga istilah tersebut term yang populer digunakan dalam praktik pendidikan Islam adalah term *al-tarbiyah*. Sedangkan term *al-ta'dib*, dan *al-ta'lim* cukup jarang digunakan. Kendati demikian ketiga term tersebut memiliki kesamaan makna, namun memiliki perbedaan secara essensial. Berikut penjelasan dan argumentasi dari beberapa ahli pendidikan:

#### **1) Al-Tarbiyah**

Istilah ini berasal dari kata *rabba*. Pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, melestarikan (Nizar, 2002: 25). Secara filosofis menunjukkan bahwa proses pendidikan Islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai "pendidik" seluruh ciptaa-Nya, termasuk manusia. Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam term *al-tarbiyah* terdiri atas empat unsur pendekatan (7), yaitu: (1) memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa (baligh); (2) mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan; (3) mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan; (4) melaksanakan pendidikan secara bertahap.

#### **2) Al-Ta'lim**

Menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal dibanding dengan *al-tarbiyah*. Rasyid Ridha mengartikan *ta'lim* sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu (Nizar, 2002: 27). Kata *ta'lim* mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dan berlangsung sepanjang hayat serta tidak terbatas pada masa bayi dan kanak-kanak, tetapi juga orang dewasa. Rasulullah ketika mengajarkan Al-Qur'an kepada kaum muslimin tidak terbatas pada membuat mereka sekedar dapat membaca, melainkan membaca dengan perenungan yang berisikan pemahaman, pengertian, tanggung jawab, penanaman amanah sehingga terjadi pembersihan diri (*tazkiyah*



*an-nufus*) dari segala kotoran, menjadikan dirinya dalam kondisi siap menerima hikmah, dan mempelajari segala sesuatu yang belum diketahui dan tidak diketahui (Maragustam, 2010: 23).

### 3) *Al-Ta'dib*

Istilah ini mencakup beberapa aspek yang menjadi hakikat pendidikan yang saling berkait, seperti *ilm* (ilmu), *adl* (keadilan), *hikmah* (kebajikan), *aml* (tindakan), *haqq* (kebenaran), *natq* (nalar), *nafs* (jiwa), *qalb* (hati), *aql* (akal), *maratib* dan *darajat* (tatanan hirarkis), *ayat* (symbol), dan *adb* (adab). Makna *al-Ta'dib* berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan (Nizar, Samsul, 2002: 30).

Terlepas dari itu semua, tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah membentuk kemampuan dan potensi manusia agar mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang penuh rahmat dan berkat Allah di seluruh penjuru alam semesta (*rahmatan lil alamani*). Tetapi potensi rahmat dan berkat Allah tersebut tidak akan terwujud nyata, apabila tidak diaktualisasikan melalui ikhtiar yang bersifat kependidikan secara terarah dan tepat. Jika pendidikan umum hanya ingin mencapai kehidupan duniawi yang sejahtera baik dalam dimensi bernegara atau bermasyarakat, maka Pendidikan Islam bercita-cita lebih jauh yang bernilai transedental, bukan insidental atau aksidental di dunia, yaitu kebahagiaan hidup setelah mati. Pendidikan merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan tujuan hidup orang muslim secara universal sama halnya dengan fungsi pendidikan secara umum. Namun yang membedakan Pendidikan Islam dan bukan Islam adalah metode, sistem, falsafah dan tujuan dasarnya.

Syaikh muslim Al-Ghazali mengatakan “hasil dari ilmu sesungguhnya ialah mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Semesta Alam, dan menghubungkan diri dengan para malaikat yang tinggi dan bergaul dengan alam arwah, itu semua adalah kebesaran, pengaruh, pemerintahan bagi raja-raja dan penghormatan secara naluri” Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan dan pendekatan kepada Tuhan pencipta alam. Selanjutnya AL-Ghazali mengutip sebuah Hadist “Barang siapa menambah ilmu (keduniawian) tetapi tidak menambah hidayah, ia tidak semakin dekat dengan Allah, dan justru semakin jauh dari-Nya (HR. Dailami dari Ali). Oleh sebab itu Ghazali membagi ilmu berdasarkan kegunaannya menjadi dua: *ilmu mu'amalah* (ilmu sosial) dan *ilmu mukasyafah* (ilmu filsafat & tasawuf/ ilmu Hikmah). Dalam penjelasan *ilmu mu'amalah* Al-Ghazaly membagi ilmu dalam dua macam, ilmu yang bersifat *fardhu 'ain* (wajib) dan ilmu yang bersifat *fardhu kifayah* (tidak sepenuhnya wajib).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin lama seseorang mengenyam pendidikan maka semakin dekat ia dengan Tuhannya. Untuk mendapatkan tujuan jangka panjang ini, maka sistem pendidikan ideal bukanlah sistem sekuler; yang memisahkan antara ilmu-ilmu keduniaan dengan nilai-nilai kebenaran dan sikap religius. Bukan pula sistem pendidikan Islam yang konservatif, tetapi sistem pendidikan yang integral, sebagaimana Ghazali menempatkan ilmu *mu'amalah* (sosial): ada yang bersifat *fardhu 'ain* (wajib) dan ada yang bersifat *fardhu kifayah* (tidak wajib sepenuhnya). Ghazali meletakkan ilmu-ilmu agama & syariat (*aqidah, akhlaq, fiqih, kalam, tauhid, dll*) sebagai ilmu yang paling utama (*fardhu 'ain*) yang wajib diberikan dalam pendidikan. Dan ilmu-ilmu keduniaan; seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu teknik, pertanian, dan lainnya di posisi kedua (*fardhu kifayah*).

Dalam hal proses pendidikan dan pengajaran, Ghazali menggunakan pendekatan berdasarkan tingkatan intelektual manusia dengan membaginya berdasarkan 3 golongan: (1) golongan awam, yaitu golongan yang cara berpikirnya sederhana sekali. Mereka mempunyai sifat lekas percaya dan menurut, maka golongan ini dihadapi dengan memberi nasehat dan petunjuk; (2) golongan pemikir, yaitu orang-orang pilihan yang dianugerahi akal dan pikiran tajam dan mendalam, golongan ini dapat disikapi dengan ilmu hikmah; dan (3) golongan

pendebat (*ahl al-jidal*), yaitu kaum yang suka berdebat golongan ini hanya bisa dihadapi dengan mematahkan argumen-argumen mereka (Al-Ghazali, 2000).

Seorang pendidik juga harus dibekali dengan *akhlak karimah* dan memiliki sifat-sifat dan tugas-tugas khusus seperti: sifat kasih sayang, ikhlas dalam mengajar tanpa mengharapkan upah, bertutur bahasa yang halus dan sopan, mengarahkan murid pada sesuatu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka, menghargai pendapat dan kemampuan orang lain, serta mengetahui dan menghargai perbedaan potensi yang dimiliki murid (Al-Ghazali, 2000: 187-197). Anak-anak adalah termasuk golongan awam, sudah sepatutnya seorang pendidik anak mampu memberikan nasehat, petunjuk, dan suri tauladan yang baik sesuai dengan tugas-tugas khusus di atas sebab pendidikan Islam selalu berpijak pada fitrah manusia sebelum membentuknya menjadi manusia ideal.

## PEMBAHASAN

### Filosofi Pendidikan Dasar Anti Korupsi

Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berupaya memaksimalkan manfaat atas setiap aktivitas dengan biaya seminimal mungkin; dengan kata lain, dalam diri manusia sesungguhnya ada benih atau kecenderungan untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi muncul sejak manusia mulai hidup berkelompok dan bermasyarakat, membangun relasi sosial untuk mempertahankan hidup, menciptakan norma-norma sosial demi suatu cita-cita seperti kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup. Akan tetapi, masalah kemanusiaan mulai muncul ketika kejahatan oleh segelintir orang telah menciptakan ketidakadilan, kesengsaraan, dan penderitaan bagi sebagian yang lain. Nilai kebaikan dan kejahatan mulai dipertanyakan esensi dan keberadaannya di dalam diri manusia.

Hobbes dalam Campbell (1994: 85) pernah mengatakan, pada dasarnya manusia adalah makhluk individualis dan materialistis. Sebagai seorang positivis, ia berpendapat bahwa kehidupan manusia adalah sebuah perjuangan terus menerus untuk memuaskan hasrat. Kehidupan manusia adalah sebuah perjuangan terus menerus untuk memuaskan hasrat. Kehidupan manusia adalah hasrat abadi dan tak kunjung padam untuk meraih kekuasaan demi kekuasaan, yang berhenti hanya dalam kematian. Baginya masyarakat adalah sebuah bangunan buatan yang didukung bersama dengan sebuah campuran kepentingan diri rasional, kekerasan, ancaman, dan penipuan. Manusia bermasyarakat disebabkan oleh hasrat ingin menguasai satu sama lain, masyarakat adalah buatan manusia untuk mengatasi rasa takut dalam dirinya terhadap kesengsaraan dan kekecewaan.

Pendapat Hobbes diatas tidak berarti menegasikan adanya potensi kebaikan dalam diri manusia. Hidayat (2009:802) menjelaskan, sebetulnya dalam diri manusia terdapat tiga strata kejiwaan yang sangat mempengaruhi orientasi hidup sebagai mana konsep dasar jiwa Aristotelian: (1) Jiwa Nabati (*vegetability*) yaitu bersifat fisik seperti aktivitas makan, minum, tumbuh; (2) Jiwa Hewani (*animality*), yaitu jiwa yang selain bersifat nabati juga terdapat nafsu dan naluri untuk saling menerkam dan menghancurkan yang lain ketika dirinya merasa terancam. Uniknya jika muncul nafsu atau keinginan, ia akan mendekat dan mengejanya, tetapi kalau takut dan merasa terancam akan lari menjauhinya (*fight or flight*); (3) Jiwa Unسانی (*humanity*), ialah sumber dan poros utama kualitas kemanusiaan. Berbeda dengan jiwa nabati dan hewani yang mengandalkan insting, jiwa insani mempunyai daya refleksi, kesadaran moral, kreativitas, penghayatan seni, rasa humor, dan nalar sehat.

Seorang koruptor bagi Hidayat sesungguhnya seorang hanya berasyik diri pada kehidupan level hewani, kualitas dan makna hidupnya dangkal sebab kebahagiaannya hanya disandarkan pada pemenuhan yang bersifat konsumtif semata.

“Kalau seseorang korupsi hanya untuk memanjakan nafsu nabati dan hewani maka sungguh rendah orientasi hidupnya, kecuali korupsinya orang miskin dan bodoh semata untuk bertahan hidup, bisa jadi yang dosa bukannya yang korup melainkan orang kaya yang tidak membayar pajak dan pelit berzakat serta bersedekah. Disini

negara ikut berdosa telah ikut memelihara kemiskinan dan kebodohan sehingga seseorang terpaksa ataupun mencuri” (Hidayat: 2009: 803).

Oleh sebab itu, jiwa insani sangat dibutuhkan untuk mengemban amanat pendidikan dan pesan agama, bahwa dengan bekal nalar sehat, manusia hendaknya mampu membedakan dan membuat kalkulasi untung-rugi antara yang baik dan buruk, benar dan salah, dan agar manusia bisa mengendalikan jiwa nabati dan jiwa hewannya. Manusia telah dianugerahi oleh Tuhan dengan dorongan kreativitas dan reflektivitas untuk mampu keluar dari hegemoni dan rutinitas perilaku *instinctive* lalu naik ke jenjang kesadaran rasional dan pilihan moral berdasarkan kemerdekaan yang dimilikinya (Hidayat, 2009: 806). Dengan kata lain, manusia memiliki tanggung jawab moral karena kesadaran dan pilihan bebasnya.

Seorang koruptor pada dasarnya telah merusak kebutuhan dasar manusia lainnya, memporakporandakan dan mengabaikan norma-norma esensial sebagai manusia. Hal-hal yang manusiawi belum tentu berperikemanusiaan, dalam artian korupsi bisa saja disebut sebagai perilaku yang manusiawi, sebagai seseorang yang mencari cara untuk memenuhi hasrat kebutuhan dasar, keinginan, dan kebahagiaan hidup. Akan tetapi korupsi tidak sekedar dorongan-dorongan manusiawi saja, korupsi tidak bebas nilai sebab ia menyangkut moralitas seseorang. Korupsi adalah tindakan merusak, merugikan manusia dan lingkungan tempat manusia hidup. Oleh karena itu, korupsi adalah ‘jahat’ karena secara struktural menciptakan penderitaan bagi orang lain, korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Manusia diciptakan adalah untuk mengemban tugas sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Secara personal manusia bertanggung jawab terhadap pencipta-Nya, dan secara sosial manusia bertanggung jawab terhadap sesamanya. Filosof muslim-Fazlur Rahman berpendapat, hakikat hidup manusia adalah perjuangan moral yang tidak berkesudahan. Di dalam perjuangan ini, Allah berpihak pada manusia asalkan melakukan usaha-usaha yang diperlukan, karena itu diantara ciptaan Tuhan manusia memiliki posisi yang unik. Manusia diberi kebebasan berkehendak agar menyempurnakan misinya sebagai *khalifah* Allah di muka bumi. Misi inilah-perjuangan untuk menciptakan sebuah tata sosial yang bermoral di atas dunia-yang dikatakan al-Qur’an sebagai *amanah* (Rahman, 1980: 27).

Rahman mengatakan, “jika manusia sekali melakukan kebaikan atau kejahatan maka kesempatannya untuk mengulangi perbuatan yang serupa semakin bertambah dan untuk melakukan perbuatan yang berlawanan semakin berkurang bahkan untuk sekedar memikirkannya sekalipun”; dengan kata lain, apabila manusia melakukan kejahatan maka hati dan matanya akan ‘tertutup’. Betapapun kuatnya tindakan-tindakan kejahatan (korupsi) yang disebabkan kebiasaan psikologis, dari perspektif Rahman tidak boleh dipandang sebagai determinan-determinan yang mutlak, karena bagi tingkah laku manusia tidak ada keterlanjuran yang tidak dapat diperbaiki..

Kelemahan manusia yang paling dasar dan yang menyebabkannya berlaku jahat adalah ‘kepicikan’ (*dha’af*) dan ‘kesempitan pikiran’ (*qathr*); karena kepicikan itulah manusia suka terburu-buru nafsu, panik, dan tidak mengetahui akibat jangka panjang dari reaksi-reaksi yang dilakukannya; karena terburu nafsu inilah manusia menjadi sombong atau putus asa. Menurut Rahman, manusia telah terjebak dalam dua kutub ekstrim yang menjadikannya selalu goyah. Dua kutub ekstrim tersebut adalah kesombongan dan keputusasaan.

“Sesungguhnya manusia mempunyai sifat yang selalu goyah. Jika mendapatkan kemalangan ia pun berkeluh kesah tetapi jika mendapatkan kebaikan ia berusaha agar kebaikan itu tidak sampai kepada orang-orang lain” (Q.S 70: 19-12).

Oleh karena manusia adalah makhluk yang goyah maka dibutuhkan energi moral yang dapat menyeimbangkan dua kutub ekstrim tersebut yaitu *taqwa*; yang berarti melindungi diri dari akibat-akibat perbuatan sendiri yang buruk dan jahat. Caranya adalah menghindari dari kesempitan akal dan kepicikannya sendiri. Oleh sebab itu, ada tiga macam pengetahuan mengenai alam, sejarah dan dirinya sendiri (Rahman, 1980: 51).

Konsep *Taqwa* hanya memiliki arti dalam konteks sosial, tujuan al-Qur’an adalah menegakkan sebuah tata cara masyarakat yang adil dan egalitarian. Sehubungan dengan

keadilan yang merata, al-Qur'an menetapkan prinsip bahwa "kekayaan tidak boleh berputar di kalangan orang-orang kaya saja" (Q.S 59:7). Al-Qur'an juga melarang keras kegiatan persekongkolan-persekongkolan rahasia (*najwa*) yang bertujuan jahat dan aniaya (QS. 58: 11-14); seperti halnya korupsi, kolusi, nepotisme dilarang karena merupakan perbuatan yang bertujuan jahat dan tidak adil bagi sosial.

Pada dasarnya kekayaan dan usaha untuk mencari kekayaan adalah bukan hal yang buruk. Hal yang terpenting adalah bagaimana manusia memperoleh kekayaannya dan bagaimana ia mempergunakan kekayaannya. Manusia perlu memperhatikan cara yang 'baik dan 'benar' secara moral dalam hal mendapatkan kekayaan untuk tujuan yang baik pula; baik itu untuk penghidupan (*ma'isyah*), kesenangan, dan sterusnya yang dianggap baik. Satu pandangan dari etika situasi disebutkan "akibat yang baik harus didahulukan dalam mempertimbangkan tingkah laku" (Titus dkk, 1984: 162). Akan tetapi, dalam konteks kejahatan korupsi, cara (sarana) dan niat (motif) yang baik perlu didahulukan dari pada akibat (hasil) yang baik tetapi cara buruk. Alasannya bahwa manusia tidak akan pernah mengetahui secara pasti akibat (hasil) dari tindakannya sendiri selain karena memproyeksikannya (Giddens, 1976: 160), maka korupsi sepatutnya diproyeksikan sebagai tindakan yang berakibat buruk dan jahat karena cara dan niatnya yang tidak baik. Hal ini senada dengan prinsip moral Islam bahwa "*Innamal a'malu binniyat, wainnama likullimri'in ma nawa*" (segala perbuatan tergantung pada niat, dan setiap perbuatan seseorang tergantung pada niat dirinya).

### **Trilogi Islam Sebagai Landasan Moral bagi Pendidikan Anti Korupsi**

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa prinsip pendidikan yang baik menurut Islam adalah pendidikan yang memberikan jalan kepada pencucian jiwa dan pendekatan diri kepada sang Pencipta, serta bisa memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan tiga konsep dasar pokok-pokok ajaran Islam yaitu: *Iman, Islam, dan Ikhsan*. Pendidikan aqidah dan akhlak adalah yang utama sebelum manusia menjalani kehidupan sosialnya. Pemahaman tentang moralitas yang bersifat naluriah dan bersumber dari kebenaran merupakan modal bagi insan menuju kesempurnaannya, mengembangkan bakat dan potensi-potensinya menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi alam semesta (*rahmatan lilalamin*).

Merujuk pada sebuah hadist yang terkenal dengan 'Hadits Jibril', sebuah hadist yg dipandang oleh para ulama mempunyai posisi yg sangat penting, karena mencakup semua amal baik lahir maupun batin serta menjadi referensi ajaran Islam.

Dari Umar RA, beliau berkata: Pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi SAW, lalu mendempetkan kedua lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, kemudian berkata: "*Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam.*" Kemudian Rasulullah SAW menjawab: "*Islam yaitu: hendaklah engkau bersaksi tiada sesembahan yang haq disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadlan, dan mengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya.*" Orang itu berkata: "*Engkau benar.*" Kami menjadi heran, karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Orang itu bertanya lagi: "*Lalu terangkanlah kepadaku tentang iman*". (Rasulullah) menjawab: "*Hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk.*"Orang tadi berkata: "*Engkau benar.*" Lalu orang itu bertanya lagi: "*Lalu terangkanlah kepadaku tentang ihsan.*" (Beliau) menjawab: "*Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihat engkau.*" Orang itu berkata lagi:

"Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat." (Beliau) menjawab: "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Orang itu selanjutnya berkata: "Beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya." (Beliau) menjawab: "Apabila budak melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang Badui yang bertelanjang kaki, yang miskin lagi penggembala domba berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan." Kemudian orang itu pergi, sedangkan aku tetap tinggal beberapa saat lamanya. Lalu Nabi SAW bersabda: "Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu?". Aku menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Lalu beliau bersabda: "Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." (HR. Muslim).

Untuk mempelajari ketiga pokok ajaran agama tersebut, para ulama mengelompokkannya melalui tiga cabang ilmu pengetahuan. Rukun *Islam* berupa praktik amal lahiriah disusun dalam ilmu *Fiqh*, yaitu ilmu mengenai perbuatan amal lahiriah manusia sebagai hamba Allah. *Iman* dipelajari melalui ilmu *Tauhid* (teologi) yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan. Sedangkan utk mempelajari *ihsan* sebagai tata cara beribadah dan beramal sholeh adalah bagian dari ilmu *Tasawuf*. Namun ketiganya saling dikaitkan dalam konteks ilmu aqidah dan akhlak. Ketiga konsep inilah yang menjadi dasar untuk mengukur kualitas moral *ubudiyah* dan *amaliyah* seorang muslim dalam sosial dan keagamaannya, sebab Islam tidak hanya menghendaki kebaikan vertikal saja yaitu hubungan hamba dengan Tuhannya (*hablun min Allah*), tetapi juga kebaikan horizontal yaitu hubungan hamba dengan sesamanya (*hablun min an-naas*).

Korupsi adalah persoalan moral. Memberikan pendidikan anti korupsi berarti menanamkan nilai-nilai moral yang dapat membentengi seseorang dari perilaku korup seperti perilaku curang dan tidak jujur. Nilai-nilai ini hanya bisa ditanamkan sejak usia dini. Kebanyakan anak-anak usia dini belum sepenuhnya bisa membedakan antara nilai baik dan buruk, bahkan untuk bisa mengerti alasan-alasan yang dibangun dari nilai-nilai tersebut. Oleh sebab itu yang sering terlihat adalah anak-anak cenderung meniru atau meneladani perbuatan baik dan buruk dari orang yang lebih dewasa atau dari lingkungan yang turut membentuk watak dan kepribadiannya.

Terkait dengan pembentukan moral, ada perbedaan perlakuan dalam praktik pendidikan yang disesuaikan dengan kapasitas nalar anak didik. Hal ini mengacu pada konsep Al-Ghazaly (1933) yang menempatkan manusia pada empat tingkatan. Pertama, terdiri dari orang-orang yang lengah, yang tidak dapat membedakan kebenaran dengan yang palsu, atau antara yang baik dengan yang buruk. Nafsu jasmani kelompok ini bertambah kuat, karena tidak memperturutkannya. Kedua, terdiri dari orang yang tahu betul tentang keburukan dari tingkah laku yang buruk, tetapi tidak menjauhkan diri dari perbuatan itu. Mereka tidak dapat meninggalkan perbuatan itu disebabkan adanya kenikmatan yang dirasakan dari perbuatan itu. Ketiga, orang-orang yang merasa bahwa perbuatan buruk yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan yang benar dan baik. Pembeneran yang demikian dapat berasal dari adanya kesepakatan kolektif yang berupa adat kebiasaan suatu masyarakat. Dengan demikian orang-orang ini melakukan perbuatan tercelanya dengan leluasa dan tanpa merasa berdosa. Keempat, orang-orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan buruk atas dasar keyakinannya (Abul Quasem, 1988:92).

Achmad D (1962: 70) dalam bukunya "Pengantar Filsafat Pendidikan Islam" menegaskan bahwa dalam proses pembentukan kepribadian dibutuhkan tiga taraf: (1) pembiasaan, (2) pembentukan pengertian, sikap dan minat, serta (3) pembentukan kerohanian yang luhur. Untuk mencapai ketiga taraf tersebut dibutuhkan sebuah landasan moral sebagai konsep dasar pembentukan kepribadian yang luhur. Konsep tersebut dapat dipelajari dalam trilogi Islam yang isinya adalah pokok-pokok ajaran Islam itu sendiri yaitu; *Iman*, *Islam*, dan *Ihsan*.

Pada taraf **pertama**, pembiasaan; ditujukan untuk membentuk ketrampilan lahiriah, yaitu kecakapan mengucap dan berbuat berupa latihan-latihan dan contoh-contoh dari

pendidik. Kebiasaan yang dilatih adalah berupa rukun-rukun Islam yang lima (syahadat, sholat, zakat, puasa, haji) serta bersikap (berbahasa dan berbuat) sesuai tuntunan Islam. Suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan oleh peserta didik akan sukar untuk ditinggalkan dan lambat laun menjadi suatu perintah dalam hati yang harus dituruti agar hati tidak menjadi resah.

Pada taraf **kedua** setelah pembiasaan ialah penanaman pengertian. Upaya ini dilakukan untuk memberikan penjelasan dan pengertian dari latihan-latihan yang sudah dilakukan. Pengertian berhubungan dengan kepercayaan, yaitu rukun-rukun Iman yang enam (iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, qodlo & qodar/ takdir Allah), menghubungkan rukun Iman dengan amaliyah rukun-rukun Islam. Apabila pengertian telah meresap pada anak didik maka akan terlihat perubahan sikap pada dirinya dan aktivitas mereka dalam mengerjakan rukun Islam akan bertambah besar. Antara tindakan lahiriah dan batiniahpun menjadi selaras. Pada saat memberikan arahan, hendaknya dengan penuh kebijaksanaan (*hikmah*) dan nasehat yang baik (*mau'idhoh hasanah*), dan membantahnya dengan cara yang baik pula (QS. An-Nahl: 125).

Pada taraf **ketiga** adalah membentuk budi luhur. Di tingkat ini anak didik sudah mencapai kedewasaan. Dengan bekal penanaman *Iman* dan *Islam* di usia anak-anak, maka tanggung jawab moral diserahkan kepada diri sendiri setelah mencapai dewasa (*aqil baligh*). Pendidikan ini dapat disebut sebagai *Adult Education*, yaitu pendidikan diri sendiri. Pada tahap inilah konsep *Ihsan* mulai diperkenalkan secara mendalam. *Ihsan* yang berarti berbuat baik dan beramal sholeh seolah-olah Allah hadir dalam dirinya atau Allah sedang mengamatinnya. Berbuat baik bukan karena manusia atau demi sesuatu hal selain karena tunduk dan patuh kepada perintah Allah. "Barang siapa berbuat kebajikan, kebajikanlah yang ia dapat, dan barang siapa yang berbuat keburukan, keburukanlah yang ia peroleh" (QS. Az-Zilzal: 7-8). "Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri . . ." (QS. Al-isra':7). "Dan berbuat baiklah (kpd orang lain) seperti halnya Allah berbuat baik terhadapmu . . ." (QS. AL-Qashash: 77).

Pengenalan tentang rukun *iman* merupakan penanaman pada aspek ketuhanan (*tauhid*), keesaan, kekuasaan, dan keagungan Allah sebagai landasan moral penghambaan seseorang untuk takut dan tunduk pada perintah dan ketetapan sang Pencipta. Rukun *Islam* juga mengandung pendidikan moral yang menuntun manusia untuk berlaku baik secara individual maupun sosial walaupun dalam tingkat yang sederhana, maka peningkatan dan penyempurnaan adalah bagian dari pendidikan *ihsan*. Terdapat 166 ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang *ihsan* dan implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa agung dan mulia perilaku dan sifat ini sehingga mendapat porsi yang istimewa dalam Al-Qur'an.

Dalam kajian tasawuf, *ihsan* mencakup amalan-amalan sholeh yang terdiri dari empat tahapan: *syari'at-tarikat-hakikat-ma'rifat*. Fase *syari'at*, adalah tempat mengamalkan kategori *Islam* dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban rukun Islam secara tertib dan teratur. Pada fase ini, kebaikan yang diperoleh adalah derajat *taqwa/ muttaqin*; yaitu orang-orang yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Pemupukan rohani ini didahului dengan 'taubat'; yaitu merasa sadar dan menyesal atas pelanggaran yang telah dilakukan. Taubat adalah titik balik dari kesesatan menuju kebenaran. Taubat merupakan gerakan untuk taat kepada Allah yang menurut Al-Ghazaly (1962: 29) harus melalui empat macam perlawanan (*mujahadah*) dari tipu daya:

- (1) Dunia; dengan melakukan zuhud
- (2) Manusia; dengan menjaga pergaulan bersama orang-orang yang berbudi luhur
- (3) Setan; dengan memperbanyak dzikir (ingat) kepada Allah
- (4) Nafsu; mengekangnya dengan taqwa

Seseorang yang bertaqwa akan bertindak konsisten (*istiqomah*) dalam menjalani hidupnya. Seiring dengan itu, ia akan menjaga kedudukan diri dengan berakhlak baik dengan sesama dan tidak memaksakan kehendak atau nafsu pribadi. Setelah seseorang telah dapat menata tingkah laku lahirnya maka berikutnya ia akan menertibkan tingkah laku batinnya

(*dlamir-nya*). Saat inilah ia telah memasuki alam *tarikah*; tempat mengamalkan kategori '*islam, iman, dan ihsan*'. Pada fase ini, yang diperjuangkan adalah bagaimana diri pribadi bisa bertindak *ikhlas* (lepas dari kehendak nafsu), *sidq* (jujur, sungguh-sungguh), dan *thuma'ninah* (tenang / kerelaan dan kepasrahan hati) Orang-orang yang berada pada fase ini adalah golongan *abrar /birr*; yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan karena kebutuhan bukan kewajiban, banyak beramal sholeh (kebajikan) yang bersifat sunnah (dianjurkan) dalam ibadah maupun muamalah. "Bukanlah kebaikan dengan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah taqwa, dan datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertaqwalah kepada Allah agar kalian beruntung." (Qs. Al-baqarah: 189).

Tujuan dari pengamalan alam *tarikah* tidak lain untuk mencapai derajat *ihsan (muhsin)* yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan atau amal shaleh karena kewajiban sekaligus kebutuhan demi mendapatkan cinta dan ridhlo Allah SWT. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kamipun beriman. Ya tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat baik." (Al-imran: 193).

Dalam Al-qur'an, terdapat 166 ayat yang berbicara tentang *ihsan* dan implementasinya. Dari sini kita dapat menarik satu makna, betapa mulia dan agungnya perilaku dan sifat ini, hingga mendapat porsi yang sangat istimewa dalam Al-qur'an. Berikut adalah beberapa ayat yang menjadi landasan akan hal ini:

"Dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Al-baqarah: 195)

"Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan." (Qs. An-nahl:90)

". . . .serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. . . ." (Qs. Al-baqarah:83)

"Dan berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahayamu. . . ." (Qs. An-nisa': 36)

Dengan demikian *ihsan* mencakup tiga aspek; ibadah, muamalah, dan akhlak. Pada tahap *ihsan* sejatinya adalah penyempurnaan dalam beramal dengan menjaga keikhlasan dan kejujuran dalam beramal. Berbuat baik bukan karena ingin dilihat baik oleh orang lain, tetapi karena Tuhan sedang melihat atau diri kita sedang melihat Tuhan, disinilah aspek kejujuran menjadi ukuran. Sikap *ihsan* ini muncul bersamaan dengan sikap kepasrahan diri (*islam*) dan rasa cinta serta patuh kepada Tuhan (*iman*).

Adapun fase *hakikat* dan makrifat hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang telah melewati fase *syariat* dan *tarikah*. Fase *hakikat* dimiliki oleh jiwa-jiwa yang terlatih dengan manajemen *aqal* dan *qolbu*. Fase ini merupakan tempat mengamalkan kategori *ihsan*. Al Ghazaly sendiri menjelaskan bahwa fase *hakikat* bertujuan untuk mengatur tingkah laku batin terdalam, yang tersembunyi (*sarirah*) yaitu mata hati (*bashirah*). Caranya adalah dengan melakukan *muraqabah-musyhadah-ma'rifah*. *Muraqabah* merupakan pengawasan terhadap kecenderungan hati kepada sesuatu sebelum berbuat. Lainnya halnya dengan *muhasabah* yaitu memperhitungkan keuntungan dan kerugian setelah berbuat, agar menjadi jelas kelebihan dan kekurangannya seperti memperhitungkan keuntungan berbuat baik (ibadah) dan kerugian berbuat cela (maksiat). Untuk mencapai *hakikat* (kebenaran) akal membutuhkan *dzikir* dan *tafakkur*. *Dzikir* merupakan proses penyadaran dengan mengingat-ingat dan meresapi premis-premis yang ada dalam idea yang telah diterima sebagai kebenaran. Sedangkan *tafakkur* adalah proses berfikir untuk memperbanyak pengertian dengan cara menyimpulkan dari pengertian-pengertian yang ada (Al-Ghazaly, IV: 363).

Untuk masuk fase *ma'rifat*, yaitu fase dimana jiwa dapat menyikap tabir (*mukasyafah* dan *musyhadah*) atau melihat Allah, dibutuhkan jiwa yang suci atau telah melewati pensucian jiwa secara sempurna. Ghazaly sendiri menegaskan bahwa tidak selamanya fase lanjutan dari *dzikir* dan *tafakkur* akan diikuti dengan derajat kema'rifatan, sebab antara jiwa manusia dengan Tuhan "dipisahkan oleh tabir tebal, yang berupa nafsu-nafsu keduniawian" sehingga ia

tak bisa menyingkap tabir ini (*mukasyafah*). Bagi mereka yang belum mampu mencapai *mukasyafah* pada masa hidupnya di dunia, maka kematianlah yang akan menghantarkannya ke alam ini (alam ruh) sebagaimana firman Allah: “Maka Kami bukakan penutupmu, dan karenanya penglihatanmu tajam pada hari ini (kiamat)...”(QS. Qof: 22).

Dengan demikian, selama hati dan perbuatan masih diliputi oleh nafsu-nafsu dunia maka kebaikan dan amal sholeh menjadi teramat berat untuk diamalkan. Kebaikan hanya didapat melalui proses-proses pelatihan pensucian jiwa sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh Islam Al-Ghazaly, dalam hal ini kebaikan butuh pembiasaan dan latihan-latihan. Adanya kejahatan dan keburukan karena hati masih tertutup oleh nafsu-nafsu duniawi. Antara nafsu, kalbu, dan akal budi belum berkolaborasi secara seimbang sesuai tempat (*maqom*)nya. Sudah selayaknya pendidikan moral mengedepankan manajemen ketiga struktur jiwa ini atau dalam bahasa *Sigmund Freud* ketiga struktur jiwa ini dikenal dengan *id*, *ego*, dan *superego*.

## PENUTUP

### Simpulan

Korupsi merupakan penyakit sosial, kejahatan moral dan kemanusiaan. Kejahatan korupsi bersifat struktural, dimana aktornya adalah saling berkait dalam sistem dan reproduksi sosial maka perilaku pembiaran-pembiaran terhadap bibit-bibit korupsi harus ditangani sejak dini. Pendidikan Islam menganut pola asuh sejak dari usia anak-anak sampai dewasa (*aqil, baligh*) dengan memperbaiki pola pendidikan, pengasuhan, dan pengajaran para pendidik (orang tua atau guru). Pendekatan pendidikan yang dapat dilakukan dengan memperhatikan usia dan kapasitas nalar anak didik melalui tiga tahap: (1) memberikan pelatihan-pelatihan moral (*aqidah-akhlak*) pada anak untuk membentuk karakter Islami, (2) memberikan pengertian dan penjelasan pada saat anak sudah siap secara nalar, (3) memberikan penyadaran berdasarkan kemauan dan kehendak bebas peserta didik sebagai manusia yang bertanggung jawab (*mukallaf*) kepada Tuhannya.

Pendidikan dasar anti korupsi menurut pendidikan Islam harus didasari dengan pendidikan *Iman, Islam, dan Ikhsan*. *Iman* meliputi pendidikan *aqidah tauhid* dan pengajaran tentang hal-hal yang wajib diimani sebagai hamba Allah sebagai pondasi moral anak didik. *Islam* meliputi pendidikan *muamalah* (akhlak sosial) yang wajib dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. *Ihsan* menyangkut pendidikan akhlak personal yang meliputi pendidikan pengendalian dan penghindaran diri hal-hal yang dilarang dengan penanaman *akhlak mahmudah* ke dalam semua aspek kehidupan. Dengan *basic* pendidikan moral Islam ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak-anak dan benteng bagi masyarakat agar terhindar dari godaan praktik korupsi dengan penuh kesadaran.

### Saran

Hakikat pendidikan adalah penanaman nilai-nilai, maka pendidikan anti korupsi seyogyanya mengedepankan penanaman nilai-nilai yang dapat membentengi dorongan-dorongan perilaku korup. Kelemahan pendidikan modern secara praksis berpijak pada konsep hasil dan manfaat. Dasar pemikiran ini sebagaimana didengungkan oleh aliran pendidikan *pragmatis* yang dibawa oleh pemikir-pemikir Barat seperti John Dewey dan kawan-kawan. Filsafat pragmatism telah mengabaikan konsep-konsep kebenaran dan menggantinya dengan kegunaan, dan pengaruh itu berjalan terus, menciptakan manusia-manusia yang menghancurkan konsep keagungan dan kemuliaan diri manusia itu sendiri. Penggantian konsep tersebut mengharuskan para ahli pendidikan untuk mengubah sistem pendidikan yang ada sekarang, yang menyangkut dasar, tujuan, materi, kualifikasi, sistem evaluasi pendidikan dan lain-lain. Trilogi Pendidikan Islam (*iman, islam, ihsan*) sepatutnya dimaknai secara universal, bukan hanya sebagai pengetahuan berbasis kepercayaan agama saja melainkan dapat menjadi prinsip-prinsip universal terhadap pengembangan pendidikan yang berbasis pembangunan karakter anak bangsa agar terhindar dari perilaku-perilaku negatif seperti korupsi.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an al-Karim, 2010, *Al-Quranul Karim Terjemah Tafsir Per Kata (Syaamil Al-Qur'an)*, Bandung: Sygma, cet.1
- Al-Ghazali. 1933. *Kitab Ihya Ulumiddin*, jilid III & IV, Mesir: Usmaniyah, cet.I
- \_\_\_\_\_. 1963. *Intisari Filsafat Al-Ghazaly*, penyusun: H. Rus'an, Jakarta: Bulan Bintang
- \_\_\_\_\_. 1962. *Cinta dan Bahagia*, penyusun: Abdullah bin Nuh, Jakarta: Tinta Mas, cet.VII
- \_\_\_\_\_, 2000. *Kitab Al-Ilm (Ilmu dalam Pemahaman Kaum Sufi Al-Ghazali)*, Bandung: Mizan Media Utama
- Al-Razi, Fakhrudin. 1985. *Tafsir al-Razi*, Beirut: Dar al-Fikr, juz. 26
- Al-Syaibany, Omar Mohammad Al-Toumy. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*, (diterj. Oleh Hasan Langgulung), Jakarta: Bulan Bintang
- Asy'arie, Musa. 1999. *Filsafat islam (Sunnah Nabi Dalam Berfikir)*, Yogyakarta: LESFI
- Achmad, Mudlor. Tanpa tahun, *Etika dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash
- Bagus, Lorens. 2000. *Kamus Filsafat*, Jakarta: P.T Gramedia Utama
- Fatimah, Irma (ed.), 1992. *Filsafat Islam (Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif)*, Yogyakarta: Jurnal LESFI
- Hidayat, Rosidah Aliim. 2013. *Penanaman Karakter Inti Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini*, Surakarta: Fairuz Media (Jurnal Prosiding Seminar Nasional Manajemen Pendidikan)
- Kattsoff, Loui O. 1992. *Pengantar Filsafat*, (diterj. Oleh Soejono Soemargono), Yogyakarta: Tiara Wacana
- Lestari, Dwi Puji. Tanpa tahun. Peningkatan Perilaku Anti Korupsi Melalui Metode Story Telling, Jakarta: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, **DOI:** <https://doi.org/10.21009/JPUD.101.011>
- Maragustam. 2010. *Mencetak Pembelajar menjadi Insan paripurna (Falsafah Pendidikan Islam)*, Yogyakarta: Nuha Litera
- Mubayyinah, Fira. 2017. SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini, Tuban: Jurnal Al Hikmah Vol. 1 (2)
- Nashori, Fuad. 2003. *Potensi-potensi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Ciputat Pers
- Noeng Muhadjir, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nurdjana, IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahman, Fazlur. 1980. *Major Themes of The Qur'an (Tema Pokok Al-Qur'an)*, (diterj. Oleh Anas Mahyuddin dkk.), Bandung: Penerbit Pustaka
- Rasyidi. 2015. *Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Tamaddun Ummah, Vol.1 no.1 Oktober 2015
- Sarwono, Sarlito. 2013. *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Singgih, 2002. *Duniapun Memerangi Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan
- Thoyyibah, Imadah. 2015. *Makna kejahatan Struktural Korupsi Dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens*, Yogyakarta: Jurnal Filsafat UGM, Vol 25, No.1, Februari 2015
- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pahami Dulu Baru Lawan (Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi)*, [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)
- Widjoyanto, Bambang (ed). 2010. *Koruptor Itu Kafir (Telaah Fiqih Korupsi Dalam Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama (NU))*, Jakarta: Mizan